

UPAYA OPTIMALISASI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAGETAN MENGGUNAKAN PRINSIP DASAR MANAJEMEN

Saka Dio Prohansah

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
saka.18030@mhs.unesa.ac.id

Deby Febriyan Eprilianto

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
debyeprilianto@unesa.ac.id

Abstrak

Konsep otonomi daerah membuat pemerintah pusat membagi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dengan upaya peningkatan pendapatan daerahnya. Kabupaten Magetan mempunyai potensi pariwisata yang dapat mendorong Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya optimalisasi pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan Menggunakan Prinsip Dasar Manajemen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dan Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan model prinsip dasar manajemen penerimaan daerah yang dikemukakan oleh Mahmudi (dalam Siamita, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perluasan basis penerimaan, dimana dinas memunculkan pariwisata baru sebagai objek wisata penyangga yaitu desa wisata, 2) pengendalian kebocoran, dimana terdapat aplikasi e-ticketing untuk mencegah kebocoran akibat pungutan liar, 3) efisiensi administrasi pendapatan, dimana terdapat SOP administrasi dinas untuk mewujudkan efisiensi, 4) transparansi dan akuntabilitas, dimana media sosial sebagai tempat keterbukaan publik Dinas. Dari hasil analisis secara keseluruhan upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan sudah cukup baik jika dilihat dari Prinsip Dasar Manajemen, namun masih belum maksimal dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk menunjang efisiensi administrasi dan anggaran. Saran dari peneliti adalah mulai bertransisi menuju digital agar terjalannya efisiensi program dinas dan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan.

Kata Kunci: Otonomi, Pendapatan, Optimalisasi, Pariwisata

Abstract

The concept of regional autonomy makes the central government to divide power to local governments. As an autonomous region, the region has the authority to regulate and manage its own household, including efforts to increase regional income. Magetan Regency has tourism potential that can boost Regional Original Income. This study aims to determine the efforts of optimizing tourism in increasing the Regional Original Income of Magetan Regency using the Basic Principles of Management. This study uses qualitative methods, where the type of research used is descriptive qualitative. Data collection techniques in this study through interviews, observation and documentation. The subjects of this study were the Head of the Tourism and Culture Office of Magetan Regency and the Head of the Tourism Management Division of the Magetan Regency Tourism and Culture Office. This study uses the model of the basic principles of regional revenue management proposed by Mahmudi (in Siamita, 2019). The results of the study show that 1) expansion of the revenue base, where the office creates tourism as a new buffer tourism object, namely tourism villages, 2) leakage control, where there is an e-ticketing application to prevent leakage due to illegal levies, 3) revenue administration efficiency, where there is an administrative SOP services to achieve efficiency, 4) transparency and accountability, where social media is a place for public disclosure of the Service. From the results of the overall analysis, the efforts made by the Department of Tourism and Culture of Magetan Regency are quite good when viewed from the Basic Principles of Management, but are still not optimal in the use of Information Technology to support administrative and budgetary efficiency. Suggestions from researchers are to start transitioning to digital so that the efficiency of service programs and public information disclosure at the Tourism and Culture Office of Magetan Regency can be established.

Keywords: Autonomy, Income, Optimization, Tourism

PENDAHULUAN

Daerah mempunyai peran yang esensial dalam berkontribusi terhadap pendapatan daerah pada era otonomi daerah saat ini. Adanya konsep otonomi daerah membuat pemerintah pusat membagi kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi sumber daya yang ada, sehingga pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk dapat mengelola sumber daya tersebut secara efisien dan efektif yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah tersebut (Sunarti, 2019).

Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Dimana didalam undang-undang tersebut menjelaskan sebagai daerah otonom, kabupaten/kota memiliki hak, kewajiban dan wewenang untuk dapat mengatur serta mengatur tatanan penyelenggaraan rumah tangganya sendiri. Kabupaten/kota juga berwenang untuk menggali lebih dalam pada sumber daya dan potensi daerahnya sendiri agar dapat menjalankan tata kelola pemerintahan dan mengelola pembangunan di daerahnya.

Adanya otonomi yang dimiliki pemerintah daerah dari pemerintah pusat membuat daerah tersebut mempunyai hak penuh untuk mengatur dan melaksanakan sendiri bagian dan kewenangannya masing-masing serta daerah berhak mengelola potensi daerahnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan, keadilan rakyat dan sebagai wujud penghormatan terhadap budaya lokal (Sunarti, 2019) Kebijakan yang dibebankan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri salah satunya adalah mengenai peraturan keuangan daerah. Kewenangan keuangan daerah tersebut terbagi menjadi anggaran penerimaan dan juga anggaran belanja. Alokasi anggaran akan digunakan sebagai sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Otonomi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah selaras dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal sendiri menurut Setoto dalam (Hastuti, 2018) merupakan perwujudan, pembagian kekuasaan, tanggung jawab serta kewenangan dalam pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek pengeluaran maupun aspek penerimaan.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk dapat melakukan pembelanjaan dan pemungutan pajak. Yustika dalam (Triarda & Damayanti, 2021) mengungkapkan desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dalam keuangan daerah, didefinisikan sebagai kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan diukur

melalui kemampuan menggali serta mengelola keuangannya.

Pemerintah daerah dituntut untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di masing masing daerah sekaligus dituntut memiliki kemampuan dalam pengelolaan peningkatan pendapatan yang baik (Said, 2021). Pengelolaan peningkatan pendapatan yang baik dapat tercermin dalam jumlah pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan yang paling potensial jika dimanfaatkan dengan baik (Nuraina & Wijaya, 2014).

Kondisi ekonomi masing masing daerah menjadikan perbedaan strategi peningkatan Pendapatan Asli daerah dapat berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya ekonomi (Triarda & Damayanti, 2021). Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, adalah sebuah penerimaan daerah yang diperoleh dari hasil pungutan sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Bab V menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

- 1) Pajak Daerah,
- 2) Retribusi Daerah,
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan,
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah salah satunya yaitu dengan memaksimalkan adanya potensi dan sumber daya yang ada agar bisa menjadi penerimaan pendapatan daerahnya. Pendapatan daerah tersebut erat kaitanya dengan retribusi daerah, yang mana menggali sumber daya yang ada, salah satunya pada sektor pariwisata (Said, 2021). Pariwisata merupakan kegiatan manusia yang dilakukan dengan keadaan sadar dan memperoleh pelayanan secara bergantian diantara warga negara dalam negeri maupun warga negara asing (Syahputra & Ma'ruf, 2020). Pemerintah harus mulai memfokuskan diri kepada kebijakan ekonomi sebagai promosi pariwisata sebagai sumber kebangkitan ekonomi daerah (Novianti et al., 2017). Indonesia kaya akan potensi pariwisata yang tersebar luas ke berbagai daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membantu perekonomian Negara. Sektor pariwisata jika diatur dengan baik dan berkualitas dapat memberikan kontribusi kepada negara, antara lain pariwisata dapat menambah devisa negara, memicu pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru (Yakup, 2019). Upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan salah satunya adalah dengan mengembangkan industri pariwisata, karena secara langsung perkembangan sektor wisata akan

memberikan banyak dampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat maupun terhadap daerahnya (Nuraina & Wijaya, 2014)..

Melihat potensi pariwisata di Indonesia yang tinggi, hal tersebut membuat Indonesia mempunyai daya tarik pariwisata bagi wisatawan mancanegara. Terbukti dengan data yang disajikan Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 terdapat 11 provinsi yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara yaitu Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Banten dan Sumatra Barat. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang masuk dalam 11 provinsi yang banyak di kunjungi wisatawan mancanegara. Menurut Badan Perencanaan Daerah Jawa Timur (2019), Provinsi Jawa Timur mempunyai Daerah Tujuan Wisata (DTW) sebanyak 760 yang terbagi dalam 306 DTW Budaya, 264 DTW berupa wisata alam dan DTW wisata minat khusus sebanyak 190 tujuan. Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi keindahan alam yang sangat luar biasa. Letak strategis Kabupaten Magetan tepatnya pada daerah pegunungan dapat menambah nuansa sejuk dalam pariwisata. Banyak tempat wisata di Kabupaten Magetan yang dapat diandalkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Telaga Sarangan adalah salah satu objek wisata yang terkenal dari Kabupaten Magetan.

Berikut adalah tempat wisata di Kabupaten Magetan yang menarik perhatian pengunjung.

Tabel 1. Tempat wisata dan jumlah pengunjung tahun 2021

Tempat Wisata	Jumlah Pengunjung
Telaga Sarangan	629.038
Air Terjun Tirtosari	16.284
Telaga Wahyu	4.954
Air Terjun Waton Jamas Ndak Tuo	-
Bumi Perkemahan Mojosemi	-
Puncak Lawu/ Cemoro Sewu	2.143
Candi Simbatan Wetan/ Petirtaan Dewi Sri	103
Mojosemi Forest Park	42.730
Taman Genilangit	46.501

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan

Melihat banyaknya tempat wisata yang ada di Kab. Magetan yang secara langsung dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah, maka membuat Pemerintah Daerah memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan pengelolaannya. Tidak dipungkiri

bahwasannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata didapatkan apabila dalam pengelolaannya objek wisata dilakukan dengan baik dan optimal. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan meliputi retribusi daerah, pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang terpisah dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut dimana tabel ini merupakan data pendapatan asli daerah Kabupaten Magetan pada 3 Tahun terakhir dari sektor Pariwisata. Berikut ini adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata Kabupaten Magetan:

Tabel 2.
Realisasi PAD Sektor Pariwisata

No	Tahun	Realisasi
1	2019	Rp. 15.934.092.000
2	2020	Rp. 10.974.247.000
3	2021	Rp. 9.564.832.000

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan, 2022

Dari tabel diatas, penerimaan daerah dari sektor pariwisata yang diterima oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan mengalami penurunan, sehingga tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kabupaten Magetan, pada tahun 2021 terdapat perubahan target PAD dalam APBD yang sebelumnya sebesar Rp. 222, 6 Miliar menjadi Rp. 206, 885 Miliar sehingga terjadi penurunan sebesar Rp. 15, 7 Miliar. Terjadinya penurunan target berikut disebabkan oleh pandemi covid-19 yang melanda sehingga melumpuhkan sektor pariwisata sehingga Kabupaten Magetan kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD) hingga miliaran rupiah (Muhammad, 2021).

Dimulai dari tahun 2019 akhir yaitu tepatnya pada bulan Desember, dunia sedang dihebohkan oleh penyebaran wabah baru yang diawali oleh Cina disebut dengan *coronavirus* (Azizah, 2020). Azizah (2020) menambahkan bahwa *coronavirus* adalah salah satu jenis penyakit baru dan termasuk dalam kategori pandemi yang penyebarannya melalui virus *Sars-Cov-2* atau jenis keluarga *coronavirus*.

Di Indonesia wabah penyakit *Sars-Cov-2* masuk pada awal bulan Maret tahun 2020 (Ellyvon Pranita, 2020). Adanya pandemi *coronavirus* menyebabkan kerugian pada sektor-sektor di Indonesia, termasuk dengan sektor wisata yang secara langsung merasakan dampak dari adanya penyebaran virus. Fakhruddin (2021) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan pada masa pandemi harus kehilangan potensi pendapatan asli daerah hingga miliaran dari sektor pariwisata selama diberlakukannya kebijakan untuk memutus tali penyebaran *coronavirus* oleh Pemerintah Indonesia.

Fakhrudin (2021) menambahkan bahwa Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Magetan, Joko Trihono menuturkan berdasarkan data yang ada bahwa pada bulan Agustus pendapatan sektor wisata hanya terkumpul 44,4 persen dari target yang telah ditetapkan akibat diberlakukannya PPKM darurat. Apabila dibandingkan pada tahun 2019, sebelum pandemi melanda Indonesia, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan menjadikan pariwisata sebagai alat untuk pendapatan asli daerah dan menargetkan sebesar 15 miliar untuk PAD sektor pariwisata (Syaifulah, 2019).

Inspirasi penelitian ini muncul dari beberapa penelitian yang ada sebelumnya, baik dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah maupun dalam rangka pengembangan pariwisata. Penelitian Elva Nuraina dan Anggita Langgeng Wijaya yang membahas tentang Potensi Pariwisata Bendungan Gonggang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan diteliti dengan menggunakan teori dari Albert Humphrey yaitu analisis SWOT. Penelitian tersebut menemukan bahwa Salah satu tempat wisata yaitu Bendungan Gonggang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor pariwisata di Kab. Magetan. Namun, tempat tersebut baru diresmikan sehingga cenderung belum tergali secara optimal. Berdasarkan analisisnya, peneliti menghasilkan bahwa Bendungan Gonggang harus dioptimalkan dalam penyediaan fasilitas umum penunjang. Hal tersebut dikarenakan Bendungan berpotensi menciptakan lapangan kerja baru yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan optimalisasi dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Nuraina & Wijaya, 2014). Kemudian, Penelitian Bobby Yulianto dalam pengembangan pariwisata Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yang menggunakan teori analisis strategi pemasaran dari Kotler dan Lane (2007) dalam (Lukmandaru & Istoto, 2016), menemukan bahwa Pengembangan Pariwisata dituangkan dalam tiga strategi yaitu Pengembangan tempat wisata, Promosi pariwisata dan Pengembangan usaha pariwisata (Yulianto et al., 2019). Pada kesempatan ini, penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang berbeda dan belum diteliti oleh penulis pada penelitian terdahulu, dimana poin penelitian yang dilakukan penulis yakni Upaya Optimalisasi Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan, menggunakan indikator yang berlainan juga dari penelitian sebelumnya yaitu menggunakan pendapat dari Mahmudi (2010), yang menguraikan Prinsip Dasar Manajemen Peningkatan Penerimaan Daerah sebagai metode untuk mencapai target yang ditentukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merasa bahwa topik tersebut menarik dan wajib

untuk diteliti lebih dalam dan luas mengenai Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi sektor Pariwisata, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengoptimalkan sektor pariwisata yang kemudian akan menciptakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melihat hal tersebut penulis membahas dan melakukan penelitian mengenai “Optimalisasi Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan Menggunakan Prinsip Dasar Manajemen” dengan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Mahmudi yang terdiri dari Perluasan Basis Penerimaan, Pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi, serta transparansi dan akuntabilitas.

METODE

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah digambarkan, dalam kesempatan penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Dimana jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mengetahui gambaran masalah yang akan diteliti secara menyeluruh. (Puspaningtyas, 2022)

Fokus penelitian ini adalah mengenai upaya optimalisasi pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggunakan model prinsip dasar manajemen peningkatan penerimaan daerah yang dikemukakan Mahmudi dalam (Fitriani & Maruf, 2019) yaitu :

1. Perluasan basis penerimaan

Model prinsip dasar manajemen yang pertama adalah perluasan basis penerimaan, tepatnya adalah sumber penerimaan yang didapatkan diperluas. Untuk strategi perluasan yang dapat dilakukan seperti perbaikan pada kebijakan atau pada administrasi.

2. Pengendalian atas kebocoran

Pengoptimalan pendapatan harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah kebocoran melalui kegiatan pengawasan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mencegah kebocoran sehingga dilakukan identifikasi penyebab kemudian dilakukan upaya penyelesaian melalui solusi tepat.

3. Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan

Dalam upaya optimalisasi diperlukan peningkatan efisiensi pada administrasi pendapatan, karena efisiensi administrasi pendapatan sangat memiliki pengaruh terhadap peningkatan upaya penerimaan daerah. Masyarakat adalah penilai dari kinerja tersebut, sehingga harus dilakukan dengan maksimal agar masyarakat tidak enggan dalam pengurusan pajak.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah implementasi dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Pertanggungjawaban sumber daya dan pelaksanaan kebijakan adalah upaya untuk menghilangkan penyimpangan atas penyakit birokrasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan yaitu Bapak Joko Trihono S.Sos M.Si, Bapak Eka Radityo, S.STP selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan dan Bapak Rohmad sebagai salah satu masyarakat Magetan .

Sedangkan teknik untuk menganalisis data yaitu menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016) yang terbagi dalam beberapa bagian, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data mengenai optimalisasi pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Magetan, kemudian mencari informan untuk diwawancarai sebagai narasumber untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah, setelah mendapatkan data, data yang ada di dokumentasikan untuk memperkuat hasil penelitian. Kemudian, peneliti akan mendeskripsikan terkait sektor pariwisata dalam mendongkrak pendapatan asli daerah Kabupaten Magetan dan mengambil kesimpulan mengenai hasil analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kabupaten Magetan memiliki luas wilayah 688.85 KM yang terbagi dalam 18 Kecamatan, 208 desa dan 28 kelurahan. Kabupaten Magetan memiliki ketinggian sekitar 660 s/d 1.660 diatas permukaan laut. Keberadaan Gunung Lawu sebagai Gunung tertinggi ke 4 di Jawa Timur menjadi ciri khas Kabupaten Magetan, ditambah dengan hawa dingin nan sejuk, air melimpah ruah dan tanah yang subur merupakan salah satu keistimewaan Kabupaten Magetan.

Keistimewaan lainnya adalah Kabupaten Magetan memiliki banyak destinasi pariwisata. Dengan banyaknya destinasi wisata yang ada, harus dioptimalkan untuk menunjang perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyusun upaya optimalisasi pariwisata dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dengan

menggunakan model Prinsip Dasar Manajemen peningkatan Penerimaan Daerah yang dikemukakan Mahmudi dalam (Siamita, 2019) :

1. Perluasan Basis Penerimaan

Perbaikan dan inovasi pada tatanan kebijakan dan administrasi cenderung dapat meningkatkan penerimaan daerah (Mahmudi, 2010). Di Kabupaten Magetan terdapat objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dan swasta atau Desa Wisata. Pariwisata tersebut terbagi atas pariwisata utama dan penyangga. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Magetan, upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dalam perluasan basis penerimaan ada beberapa cara. Pertama, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan mengidentifikasi dan memunculkan objek wisata baru untuk memperluas basis penerimaan. Telaga Sarangan Merupakan bentuk pariwisata utama di Kabupaten Magetan. Namun seringkali pada hari libur atau akhir pekan seringkali tidak dapat menampung wisatawan dan menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Wisatawan yang berkunjung pada Telaga Sarangan pada hari libur mencapai 12.000 wisatawan. Jumlah tersebut hampir memenuhi kapasitas Telaga Sarangan yaitu sebanyak 15.000 kuota wisatawan. Meskipun masih selisih 3000 kuota, wisatawan harus berdesak-desakan untuk menikmati Telaga Sarangan. Sehingga mengenai perluasan basis penerimaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan berusaha memunculkan objek pariwisata baru sebagai pariwisata penyangga dari pariwisata utama. Pariwisata penyangga tersebut adalah Desa Wisata.

Desa wisata merupakan sebuah inovasi baru dalam hal wisata untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Selain itu, Desa Wisata juga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal (Leonandri & Rosmadi, 2018). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan bekerja sama dengan Forum Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Magetan (Forpokdarwis) mengupayakan 10 (sepuluh) Objek wisata desa bisa termaktub dalam Surat Keputusan Bupati Magetan. 10 (sepuluh) Desa yang diusulkan ke Bupati Magetan antara lain, Desa Pacalan, Ngancar, Jabung, Sumberdodol, Genilangit, Simbatan, Kraton, Mrahu , Sidomukti dan Randugede. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan juga mendaftarkan kesepuluh Desa tersebut untuk mengikuti kegiatan yang bertajuk nasional yaitu Anugerah Desa Wisata Indonesia. Selain itu, untuk mendukung pengenalan pariwisata baru dan lama Kabupaten Magetan tahun 2022 telah menetapkan *Calender of Event* (CoE) yang akan mengadakan agenda acara 174 sepanjang tahun 2022

(Koinfo.magetan.go.id, 2022) . Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Rohmad, selaku salah satu warga Magetan beliau menyatakan ;

“*Calender of Event* tahun 2022 merupakan program yang bagus dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dan saya mengetahui itu, *Calender of Event* dapat membantu pengenalan pariwisata di Kabupaten Magetan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Magetan”.(wawancara, 25 April 2022)



Gambar 1.
Taman Wisata Desa Jabung Kabupaten
Magetan

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022

Kedua, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan adalah evaluasi tarif retribusi. Evaluasi dilakukan untuk menilai atau mengukur apakah suatu program atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan tujuan atau rencana untuk mencapainya (Prawiro, 2018). Pada saat ini Perubahan tarif retribusi khususnya Obyek Wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten Magetan belum ada perubahan lagi. Namun perubahan terakhir terjadi perubahan tarif retribusi tempat rekreasi dan pariwisata pada tahun 2017 yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata.

Ketiga, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan adalah meningkatkan data objek pariwisata. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Eka Radityo, S.STP ;

“untuk peningkatan data objek pariwisata tersebut antara lain, data pengunjung obyek wisata, tempat pariwisata, termasuk objek pendukung lainnya seperti hotel, restoran dan cafe serta data PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)”. (Wawancara, 21 April 2022)

Dalam indikator tersebut peneliti dalam pengamatannya menemukan bahwa objek pariwisata utama yaitu Telaga Sarangan memang belum cukup menampung wisatawan di hari hari besar maupun hari

libur sehingga wisatawan diminta untuk putar balik. Pariwisata penyangga yang diharapkan menjadi pengalihan wisatawan dari pariwisata utama belum dapat dimaksimalkan karena masih kurang dikenalnya objek pariwisata penyangga.

2. Pengendalian Atas Kebocoran

Pemerintah Daerah harus melakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat untuk mengoptimalkan pendapatan karena banyak sumber sumber kebocoran harus diidentifikasi untuk dibenahi, seperti penghindaran pajak, pungutan liar maupun korupsi yang dilakukan oleh karyawan atau petugas hal tersebut disampaikan Mahmudi dalam (Alfiandoko, 2016). Pertama, dalam pengendalian atas kebocoran , tarif retribusi jasa usaha telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dan Tarif retribusi rekreasi dan pariwisata telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017. Sehingga sudah jelas aturan-aturannya dan Audit atau pengecekan di setiap sektor pariwisata dilaksanakan secara rutin. Upaya tersebut dapat meminimalkan adanya pungutan liar, korupsi maupun penghindaran pajak.

Kedua, dalam pengamatan peneliti menemukan masih ada pungutan liar yang terjadi pada pemungutan retribusi tiket pariwisata. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang pengelolaan Pariwisata Dinas Pariwisata dalam wawancara peneliti sebagai berikut ;

“Pungutan liar memang masih ada mas, kami dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tetap mengupayakan untuk menghilangkan pungutan liar tersebut”. (wawancara, 21 april 2022)

Upaya pencegahan terjadinya pungutan liar pada retribusi tarif pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan mencoba menerapkan E-Ticketing yang bekerjasama dengan Bank Jatim pada Telaga Sarangan yang menjadi Objek Wisata terbesar di Kabupaten Magetan. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Joko Trihono sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan ;

“pemberlakuan aplikasi E-Ticketing akan merubah pelayan di loket Telaga Sarangan secara signifikan Jadi, Kelak, Wisatawan harus mengakses aplikasi e-ticket tersebut untuk mengisi data jumlah wisatawan dan kendaraan apa yang digunakan. Lalu tagihan bayar atau nominal jumlah pembayaran akan muncul di aplikasi sesuai data yang telah dimasukkan. Wisatawan dapat membayar secara tunai maupun non tunai. Transisi dari tiket manual ke elektronik tersebut kita laksanakan secara bertahap. Harapannya penerapan Aplikasi E-

Ticketing tersebut bisa membuat pelayanan penarikan retribusi menjadi lebih transparan dan dapat memaksimalkan PAD”. (wawancara, 21 April 2022)



Gambar 2.

Contoh uji coba penerapan Aplikasi E-Ticketing

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan

Bapak Eka Radityo, S.STP selaku Kepala Bidang Pariwisata menambahkan ;

“pelaksanaan E-Ticketing tersebut masih dalam tahap uji coba. Pada tahap ujicoba ini masih ditemui kendala yaitu masalah keamanan pada media E-Ticketing tersebut. Jika uji coba tersebut berhasil, E-Ticketing akan diterapkan pada seluruh objek pariwisata terutama yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Magetan”. (wawancara, 21 April 2022)

Ketiga, untuk melakukan pengendalian dan pencegahan kebocoran, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan melakukan pelaporan hasil penarikan retribusi setiap satu bulan sekali. Namun, sewaktu-waktu dapat dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Magetan maupun dari Bank Jatim.

Berdasarkan indikator Pengendalian Kebocoran diatas peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih belum optimal, meskipun terdapat upaya beralihnya penarikan tiket masuk pariwisata utama dari konvensional menuju ke digital. Kemudian, peneliti juga menemukan bahwa pelaporan ini masih dilaksanakan dengan manual belum tersistem dengan aplikasi.

3. Efisiensi Administrasi Pendapatan

Efisiensi administrasi pendapatan dilakukan untuk mempermudah proses, menyederhanakan, mempercepat dan tidak berbelit belit. Beberapa cara dapat dilakukan untuk mengupayakan terciptanya efisiensi tersebut seperti dengan memperbaiki prosedur, mengurangi biaya administrasi dan memanfaatkan stakeholder yang ada untuk memaksimalkan proses administrasi yang cepat dan tanggap (Mahmudi, 2010)

Efisiensi Administrasi pendapatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten yaitu melakukan proses administrasi pendapatan pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2015-2025. Efisiensi administrasi tersebut dilakukan antara lain untuk kebutuhan internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan, pendaftaran atau penetapan objek pariwisata baru dan kerjasama pihak ketiga. Pada prinsipnya, Proses administrasi pendapatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan mengacu pada Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Namun, untuk mempercepat proses administrasi, Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Magetan , Bapak Eka Radityo, S.STP menyebutkan ;

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan mempunyai Standard Operational Procedure (SOP) tersendiri untuk menunjang kebutuhan efisiensi administrasi pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan”. (wawancara, 21 April 2021)

SOP tersebut merupakan sarana untuk memperjelas alur dan tugas dalam upaya efisiensi administrasi pendapatan. Standart Operational Procedure digunakan untuk memudahkan organisasi tersebut memantau kualitas output, dikarenakan dengan adanya SOP tentunya pegawai akan bekerja sesuai alur atau tahap-tahap yang diberikan organisasi. sehingga akan mudah untuk mengontrol kualitas output yang dihasilkan.(Hongdiyanto, 2017)



Gambar 3.

Alur pelaporan pendapatan retribusi tiket pariwisata

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan

Berdasarkan indikator efisiensi administrasi pendapatan diatas peneliti menemukan bahwa proses

administrasi pendapatan pada Dinas sudah terdapat SOP pelaporan yang jelas, namun menurut pengamatan peneliti efisiensi administrasi pendapatan pada Dinas masih belum dikatakan optimal. Hal tersebut terbukti dengan pelaporan masih bersifat manual dan belum menggunakan aplikasi maupun website untuk melakukan proses administrasi maupun pelaporan administrasi pendapatan. Karena teknologi digital yang berkelanjutan dapat membantu kompleksitas administrasi dalam organisasi. (Surya, 2020)

4. Transparansi dan akuntabilitas

Manajemen Peningkatan Penerimaan Daerah akan lebih baik jika diterapkannya transparansi dan akuntabilitas karena dapat menekan angka kebocoran. Dukungan Teknologi Informasi untuk membangun sistem informasi dan staf dengan kompetensi yang baik serta lingkungan yang bersih tanpa adanya korupsi sistematis akan dapat memaksimalkan transparansi dan akuntabilitas (Mahmudi, 2010:17-18)

Upaya Transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan yaitu Pertama, dengan mengandalkan Teknologi Informasi yang mudah diakses dan dijangkau. Terdapat website, youtube dan instagram dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan yang berisi tentang laporan Kegiatan Pariwisata dan kebudayaan. Namun dalam pengamatan peneliti, pemanfaatan media sosial oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan belum maksimal terutama dalam publikasi administrasi dan anggarannya. Masyarakat berhak tahu mengenai administrasi dan pendapatan dinas sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Syamsi, 2014). Kurang optimalnya transparansi tersebut juga dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Magetan. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Rohmad, selaku salah satu warga Kabupaten Magetan ;

“Saya rasa pemanfaatan media sosial masih kurang atau belum maksimal, dari laporan administratifnya maupun dari konten-konten tertentu, sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui info terbaru”. (wawancara, 25 April 2022)

Berdasarkan wawancara diatas, membuktikan bahwa masyarakat menginginkan hak atas perolehan keterbukaan informasi terkait informasi publik sesuai Undang-Undang yang berlaku, khususnya yaitu terkait anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang keluar maupun masuk. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dalam wawancara peneliti dengan Bapak Eka Radityo, S.STP selaku Kepala Bidang Pariwisata, menyatakan ;

“Di tahun 2022 ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan terus

berusaha untuk melakukan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat, contohnya yaitu salah satu inovasi kami dengan rencana membuat aplikasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik yang akan diberi nama “Magetan 360°”. Aplikasi tersebut direncanakan berisi tentang kepariwisataan di Kabupaten Magetan.” (wawancara, 21 April 2022)



Gambar 4.
Penggunaan akun instagram Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Magetan

Sumber : Akun Instagram Dinas Pariwisata dan Pariwisata Kabupaten Magetan

Kedua, transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan baik jika terdapat staf maupun karyawan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang baik. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan memiliki keterampilan dan kemampuan yang baik. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan mempunyai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau biasa yang disebut PPID. PPID dibebani tugas untuk menerima permintaan data dan informasi dari masyarakat serta publikasi kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan. Kemampuan manajemen yang baik dibekali dengan penguasaan teknologi yang mumpuni menjadi poin plus menjadi seorang staf karena di era digital semua terlibat dalam digitalisasi. Pada tahun 2022 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan melakukan penambahan pengadaan tenaga IT (Ilmu Teknologi) di bidang pengelolaan pariwisata dan kebudayaan.

Ketiga, terjalannya lingkungan kerja yang bersih tanpa adanya korupsi. Korupsi merupakan salah satu

patologi organisasi yang bisa berakibat fatal akibatnya sehingga merugikan organisasi tersebut. Bapak Eka Radityo, S.STP sebagai Kepala Bidang Pariwisata menyatakan ;

“Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan tidak terdeteksi adanya kasus korupsi. Hal tersebut disatu sisi dari karena kompetensi para staf yang baik dan dilain sisi karena adanya agenda evaluasi secara rutin dan audit dari lembaga yang berwenang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan”. (Wawancara, 21 April 2022)

Berdasarkan indikator transparansi dan akuntabilitas, peneliti menemukan upaya transparansi dan akuntabilitas sudah cukup baik namun belum maksimal. Penggunaan akun media sosial yaitu instagram dan website hanya menampilkan agenda atau kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan sehingga transparansi mengenai laporan administrasi maupun anggaran dana masuk atau keluar belum dapat diakses secara mudah oleh publik.

PENUTUP

Simpulan

Otonomi daerah dimiliki oleh pemerintah daerah berguna untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Daerah mempunyai kewenangan atas pengelolaan urusan masing masing dan potensi daerahnya yang bertujuan untuk kemajuan daerah maupun masyarakat. Seperti halnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan mempunyai otoritas untuk mengatur potensi kepariwisataan dan kebudayaan Kabupaten Magetan.

Berdasarkan informasi yang ditemui dan diterima peneliti melalui observasi, wawancara dengan beberapa subjek dan dokumentasi mengenai upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata belum terintegrasi secara optimal dalam mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dilihat dari empat indikator diatas. Hal tersebut terbukti dengan masih adanya beberapa yang harus dibenahi dalam indikator untuk meningkatkan PAD dari sektor wisata, yaitu belum dikenalnya secara luas pariwisata penyangga, aplikasi e-ticketing masih terkendala keamanan sehingga belum bisa diterapkan, proses administrasi sampai pelaporan masih dilakukan secara manual belum menggunakan aplikasi dan belum maksimalnya media sosial sebagai alat transparansi dan akuntabilitas Dinas kepada publik.

Namun, melihat kekurangan diatas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan perlu di apresiasi karena tetap berusaha meningkatkan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu

memunculkan objek pariwisata baru sebagai penyangga, mengupayakan beralihnya penarikan ticket retribusi dari konvensional ke digital untuk mengendalikan kebocoran, adanya SOP administrasi di internal dinas dan memanfaatkan media sosial untuk keterbukaan informasi publik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Upaya Optimalisasi Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan Menggunakan Prinsip Dasar Manajemen, terdapat beberapa rekomendas yang dapat diberikan peneliti, antara lain :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan harus mengupayakan publikasi pariwisata penyangga agar dikenal masyarakat secara luas.
2. Memperkuat pengawasan kepada para petugas penarikan tarif retribusi tiket masuk dan segera memberlakukan E-ticketing untuk mencegah terjadinya pungutan liar atau semacamnya.
3. Meningkatkan efisiensi administrasi dengan SOP administrasi baik di internal maupun eksternal dilakukan secara digital baik aplikasi maupun website.
4. Memberikan keterbukaan informasi publik baik kegiatan, laporan administrasi maupun anggaran dengan memaksimalkan pemanfaatan media-media sosial.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam proses penyelesaian artikel ini, antara lain :

1. Bapak dan Ibu Dosen Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya.
2. Bapak Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing penyusunan artikel ini, yang telah memberikan arahan, kritikan dan saran serta motivasi yang tinggi sehingga artikel ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Galih Wahyu Pradana , S.AP., M.AP Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran sehingga menjadikan artikel ini lebih baik.
4. Bapak Muhammad Farid Ma'ruf , S.Sos., M.AP Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran sehingga menjadikan artikel ini lebih baik.
5. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Dukut dan Ibu Sulastri yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam proses penyusunan artikel ini.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dan Masyarakat Kabupaten Magetan yang telah membantu memberikan informasi guna penyelesaian artikel ini.
7. Sahabat-sahabat yang terlibat dalam proses penyelesaian artikel ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiandoko, D. (2016). Upaya Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dalam Meningkatkan Pajak Hiburan Di Kota Surabaya (Studi Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). *Publika*, 4(6).
- Azizah, K. N. (2020). *Dugaan Kasus Pertama Virus Corona Di China Terdeteksi Pada November 2019*. Health.Detik.Com. <https://Health.Detik.Com/Berita-Detikhealth/D-5004285/Dugaan-Kasus-Pertama-Virus-Corona-Di-China-Terdeteksi-Pada-November-2019>
- Ellyvon Pranita. (2020). *Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia Dari Januari*. Kompas.Com.
- Fitriani, S., & Maruf, M. F. (2019). Upaya Optimalisasi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban. *Publika*, 7(6).
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 784–799.
- Hongdiyanto, C. (2017). The Importance Of Production Standard Operating Procedure In A Family Business Company. *Iop Conference Series: Materials Science And Engineering*, 277(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899x/277/1/012024>
- Kominfo.Magetan.Go.Id. (2022). *Gait Wisatawan, Pemkab Magetan Resmikan Calender Of Event 2022*. Kominfo.Magetan.Go.Id. <https://kominfo.magetan.go.id/wp/gait-wisatawan-pemkab-magetan-resmikan-calender-of-event-2022/>
- Leonandri, D., & Rosmadi, M. L. N. (2018). The Role Of Tourism Village To Increase Local Community Income. *Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal) : Humanities And Social Sciences*, 1(4), 188–193. <https://doi.org/10.33258/Birci.V1i4.113>
- Muhammad, F. (2021). *Target Pad Pariwisata Magetan Sulit Tercapai Di Masa Ppkm*. Republika.Co.Id. <https://republika.co.id/berita/Qz7zzx327/Target-Pad-Pariwisata-Magetan-Sulit-Tercapai-Di-Masa-Ppkm>
- Magetankita.Com. (2022). Pokdarwis Sarankan Bupati Terbitkan Sk Desa Wisata Untuk Prioritas. www.magetankita.com. <https://magetankita.com/index.php/peristiwa/1544-pokdarwis-sarankan-bupati-terbitkan-sk-desa-wisata-untuk-prioritas>
- Magetantoday.Com. (2018). Naikan Tiket, Pemkab Poles Sarangan Besar-Besaran. Magetantoday.Com. <https://magetantoday.com/naikan-tiket-pemkab-poles-sarangan-besar-besaran/>
- Newswire. (2022). 10 Desa Wisata Di Magetan Bakal Ikut Ajang Adwi 2022, Mana Saja? www.solopos.com. <https://www.solopos.com/10-Desa-Wisata-Di-Magetan-Bakal-Ikut-Ajang-Adwi-2022-Mana-Saja-1276494>
- Novianti, R., M. Baga, L., & Falatehan, A. F. (2017). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Sektor Pariwisata. *Nasional Pariwisata*, 9(April), 17–29.
- Nuraina, E., & Wijaya, A. L. (2014). Analisis Potensi Pariwisata Bendungan Gonggang Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 3(1), 53. <https://doi.org/10.25273/Jap.V3i1.1211>
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
- Puspaningtyas, A. (2022). *Jpsi (Journal Of Public Sector Innovations) Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Unggulan Kota Surabaya Dalam Masa Pandemi Covid-19*. 06(2), 84–90.
- Said, R. N. (2021). *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah*. Ipdn Jatinangor.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R And D*. Bandung : Alfabeta
- Sunarti, S. (2019). Optimalisasi Obyek Wisata Danau Limboto Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Gorontalo. *Tulip (Tulisan Ilmiah Pariwisata)*, 1(2), 63–74.
- Surya, D. (2020). *Efektivitas Penggunaan Teknologi Digital Untuk Administrasi Pajak*. Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/5ef2b5930abad75bad0c60b7/efektivitas-penggunaan-teknologi-digital-untuk-administrasi-pajak>
- Syahputra, K. A., & Ma'ruf, M. F. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai (Studi Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar, Perum Perhutani Kabupaten Blitar, Dan Pemerintah Desa Serang Kabupaten Blitar). *Publika*, 8(4).
- Syaifulallah, M. A. (2019). Disparbud Magetan Targetkan Pad 2019 Meningkatkan. *Times Indonesia*. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/195803/disparbud-magetan-targetkan-pad-2019-meningkat>
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 21–28. <https://media.neliti.com/media/publications/42389-id-partisipasi-masyarakat-dalam-mengontrol->

Penggunaan-Anggaran-Dana-Desa.Pdf

Triarda, R., & Damayanti, R. (2021). Analisis Optimalisasi Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 35–54.

Yakup, A. P. (2019). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Universitas Airlangga*.

https://drive.google.com/file/d/1o-Tf5tpbqelq1-Xx_R6cwjly_Fcziex8/view?usp=drivesdk

Yulianto, B., Yogyakarta, U. M., & Yogyakarta, U. M. (2019). *Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Magetan Guna*. January.

